

WACANA ANTIKORUPSI DALAM PUISI INDONESIA MODERN: KAJIAN SOSIOPRAGMATIK

*ANTI-CORRUPTION DISCOURSE IN INDONESIAN MODERN POETRIES:
A SOCIO-PRAGMATIC STUDY*

Novi Siti Kussuji Indrastuti

Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia
Departemen Bahasa dan Sastra
Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
novi_indrastuti@ugm.ac.id

(Naskah diterima tanggal 23 Januari 2019, direvisi terakhir tanggal 1 Juni 2019, disetujui tanggal 10 Juni 2019)

Abstrak

Kajian ini bertujuan mengemukakan masalah korupsi yang digambarkan dalam puisi, mengungkapkan pesan kepada pembaca yang terkandung dalam penggambaran masalah korupsi tersebut, dan mengungkapkan cara pesan tersebut disampaikan kepada pembaca melalui puisi. Dalam kajian ini digunakan metode kualitatif dan kepustakaan dengan pendekatan sosiopragmatik. Data diambil dari sumber yang telah dipublikasikan secara cetak maupun daring. Puisi yang dijadikan data adalah puisi bertema korupsi. Puisi dikaji dengan menganalisis representasi realitas sosial yang terkait dengan masalah korupsi di Indonesia, selanjutnya menganalisis pesan dan cara penyampaiannya kepada pembaca. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa masalah keburukan para koruptor melalui gaya satire-sarkas ditujukan sebagai persuasi kepada pembaca untuk menolak korupsi, masalah sanksi hukum yang ringan bagi koruptor Indonesia jika dibandingkan negara lain digunakan untuk membangkitkan kesadaran pembaca agar berpikir kritis, masalah maraknya budaya suap lewat alegori bertujuan menguatkan kewaspadaan terhadap korupsi, dan masalah dampak korupsi dengan gaya humor yang ironis dimaksudkan sebagai sarana penyadaran untuk memerangi korupsi.

Kata-Kata Kunci: antikorupsi, kritik, sosiopragmatik

Abstract

This study aims to bring out the corruption problems described in the poem, express messages to the readers contained in the description of the corruption problem, and reveal how the message was conveyed to the reader through poetry. In this study qualitative methods and literature were used with the socio-pragmatic approach. Data is taken from sources that have been published in print or online. Poetry used as data is corruption-themed poetry. Poetry is reviewed by analyzing the representation of social realities related to the problem of corruption in Indonesia, then analyzing the message and how to convey it to the reader. The results of this study indicate that the problem of corrupt corruptors through satire-sarcasm style is intended as persuasion to readers to reject corruption, the issue of mild legal sanctions for Indonesian corruptors compared to other countries is used to raise readers' awareness to think critically, the problem of bribery through allegory aims to strengthen awareness of corruption, and the problem of the impact of corruption in an ironic style of humor that is intended as a means of awareness to fight corruption.

Keywords: anti-corruption, criticism, sociopragmatics

1. Pendahuluan

Karya sastra merupakan cermin dari realitas sosial. Oleh karena itu, karya sastra sebaiknya dipahami dalam hubungannya dengan aspek-aspek sosial atau kemasyarakatan. Hal tersebut disebabkan sastra merupakan salah satu fenomena sosial dan produk masyarakat. Karya sastra merefleksikan kondisi sosial budaya, politik, dan ekonomi pada saat karya itu diciptakan. Sastra terlibat dalam kehidupan konkret manusia, bukan hanya sekadar gambaran abstrak sebuah dunia alternatif. Stephen Greenblatt--pelopor kritik New Historicism--menolak pandangan bahwa sastra hanyalah dunia alternatif (Taum, 2015: ix).

Puisi sebagai salah satu jenis sastra merefleksikan masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat, termasuk di dalamnya masalah korupsi. Para penyair Indonesia cukup banyak yang mengangkat masalah korupsi dalam karya puisinya, antara lain Taufik Ismail, A. Mustofa Bisri, Remy Sylado, Wiji Thukul, Sujiwo Tejo, dan W.S. Rendra. Dalam puisi karya para penyair tersebut, gambaran tentang realitas korupsi dan dampaknya di Indonesia digunakan untuk melatarbelakangi pesan antikorupsi yang disampaikan kepada pembacanya. Karya sastra diciptakan oleh pengarang atau sastrawan untuk dinikmati, dipahami, dan dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan (Damono, 1984: 3). Karya sastra mempunyai fungsi bagi masyarakat pembacanya. Menurut Horace (via Wellek dan Warren, 1990: 25), fungsi karya sastra adalah *dulce et utile* yang berarti menyenangkan dan berguna. Aspek estetik yang ada dalam karya sastra mampu menyenangkan pembacanya. Menyenangkan di sini artinya dapat memberikan hiburan bagi pembacanya, baik dari segi bahasa, teknik penyajian, alur cerita, maupun penyelesaian masalah. Bermanfaat artinya karya sastra mengandung manfaat dan nilai-nilai moral yang dapat memperluas

wawasan dan menjadi media pembentukan karakter bagi pembacanya.

Karya sastra yang berupa puisi dapat dimanfaatkan sebagai media pendidikan anti-korupsi. Gerakan antikorupsi melalui puisi cukup gencar di Indonesia. Puisi Menolak Korupsi (PMK) adalah gerakan moral yang dilakukan oleh para penyair Indonesia dalam rangka mengampanyekan sikap antikorupsi kepada masyarakat. Gerakan ini dimulai Mei 2013 dan diprakarsai oleh sastrawan Heru Mugiarto dan Sosiawan Leak. Wacana antikorupsi dalam puisi merupakan sarana yang cukup efektif untuk mengedukasi dan menegosiasi pembacanya karena kritik maupun pesan disampaikan dengan cara dan bahasa yang menarik. Kritik dan pesan anti-korupsi dalam puisi Indonesia disampaikan dengan cara mengemukakan masalah-masalah korupsi yang terjadi dalam dunia nyata. Oleh karena itu, pengungkapan pesan antikorupsi yang dibungkus dengan penggambaran masalah korupsi dalam realitas merupakan hal yang perlu dan menarik untuk dikaji.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, ada tiga masalah yang dibahas.

- a) Apa saja masalah korupsi di Indonesia yang digambarkan dalam puisi?
- b) Apa saja pesan kepada pembaca yang terkandung dalam penggambaran masalah korupsi tersebut?
- c) Bagaimana cara pesan tersebut disampaikan kepada pembaca melalui puisi?

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, kajian ini memiliki tiga tujuan.

- a) Mengemukakan masalah korupsi di Indonesia yang digambarkan dalam puisi.
- b) Mengungkapkan pesan kepada pembaca yang terkandung dalam penggambaran masalah korupsi tersebut.
- c) Mengungkapkan cara pesan tersebut disampaikan kepada pembaca melalui puisi.

2. Teori dan Metode

Dalam kajian ini dimanfaatkan dua teori, yakni teori sosiologi sastra dan pragmatik atau disingkat sosiopragmatik. Pendekatan sosiologi sastra memandang bahwa karya sastra menggambarkan fenomena sosial dalam masyarakat, sedangkan pendekatan pragmatik menitikberatkan pada pesan dan fungsi karya sastra bagi pembacanya. Fenomena korupsi merupakan masalah sekaligus kenyataan sosial dalam masyarakat. Sastra mencerminkan nilai-nilai dan berbagai permasalahan dalam masyarakat dengan tujuan agar masyarakat berintrospeksi diri dan memperbaiki kesalahannya (Duhan, 2015: 192). Dalam kajian ini, penggambaran masalah korupsi dalam masyarakat sekaligus digunakan untuk menyampaikan pesan kepada pembacanya melalui berbagai cara.

Menurut Damono (1984: 3–4), sastra menampilkan gambaran kehidupan dan kehidupan itu sendiri adalah kenyataan sosial. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan kehidupan mencakup hubungan antar-masyarakat, antarmasyarakat dengan orang-seorang, antarmanusia, dan antarperistiwa yang terjadi dalam batin seseorang. Luxemburg (1984: 23) berpendapat bahwa sastra dapat dipandang sebagai suatu gejala sosial. Sastra ditulis pada suatu periode waktu tertentu dan langsung berkaitan dengan norma-norma dan adat-istiadat suatu zaman.

Jdanov dalam Escarpit (2005: 8) mengatakan bahwa sastra harus dipandang dalam hubungan yang tak terpisahkan dengan kehidupan masyarakat, latar belakang unsur sejarah, serta unsur sosial yang memengaruhi pengarang. Sastra dan masyarakat tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena sastra tidak dapat tercipta tanpa adanya masyarakat dan masyarakat, tanpa disadari, juga merupakan bagian dari sastra yang disampaikan dengan berbagai cara (Dubey, 2013: 84). Sosiologi sastra adalah pemahaman

terhadap karya sastra dengan memper-timbangkan aspek-aspek kemasyarakatannya (Ratna, 2008: 2). Penelitian-penelitian sosiologi sastra menghasilkan pandangan bahwa karya sastra adalah ekspresi dan bagian dari masyarakat. Dengan demikian, memiliki keterkaitan resiprokal dengan jaringan-jaringan sistem dan nilai dalam masyarakat tersebut (Soemanto, 1993: 56).

Selain sosiologi sastra, dalam kajian ini digunakan pendekatan pragmatik. Istilah pragmatik menunjuk pada efek komunikasi yang sering dirumuskan dalam istilah Horatius, yaitu bahwa seorang seniman bertugas untuk *docere* 'memberi ajaran' dan *delectare* 'memberi kenikmatan', bahkan sering ditambah dengan *movere* 'menggerakkan pembaca ke kegiatan yang bertanggung jawab'; seni harus menggabungkan sifat *utile* 'bermanfaat' dan *dulce* 'manis/enak' (Teeuw, 1984: 51). Konsep pragmatik sastra yang dikemukakan oleh Sidney sebenarnya masih sejalan dengan pendapat Horatius, yakni mempunyai fungsi *to teach* (memberi ajaran) dan *delight* (memberikan kenikmatan) (Abrams, 1981: 14–21). Dengan demikian, karya seni yang baik diharapkan dapat memengaruhi pembacanya. Pradopo (1997: 199) juga menjelaskan bahwa kritik pragmatik memandang karya sastra sebagai sesuatu yang dibangun untuk mencapai efek-efek tertentu pada pembaca/pendengar, seperti efek-efek kesenangan estetik dan ajaran atau pendidikan. Kritik pragmatik cenderung menilai karya sastra menurut keberhasilannya mencapai tujuan tersebut. Terkait dengan hal tersebut, Endraswara (2004: 115) mengatakan bahwa dari aspek pragmatik, teks sastra dikatakan berkualitas apabila memenuhi keinginan pembaca dan dapat menumbuhkan kesenangan. Sastra sebagai bagian dari kebudayaan bersifat instruktif dan menghibur serta memiliki kekuatan untuk memengaruhi pemahaman dalam diri pembaca dan mendorong terjadinya kohesi sosial (Weber, 2012:1). Selain itu, penelitian pragmatik

mengandalkan aspek guna dan nilai karya bagi penikmatnya. Dengan demikian, pendekatan pragmatik bertujuan untuk mengetahui bagaimana sebuah karya sastra atau karya seni mampu memberikan ajaran, memberikan kenikmatan, dan menggerakkan pembaca ke kegiatan yang bertanggung jawab. Pendekatan pragmatik adalah pendekatan yang memandang karya sastra sebagai sarana untuk menyampaikan tujuan tertentu kepada pembacanya. Tujuan tersebut dapat berupa tujuan politik, pendidikan, moral, agama, maupun tujuan lain (Pradopo, 1997: 94).

Metode merupakan cara kerja agar dapat memahami objek yang menjadi sasaran penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut Bogdan dan Tylor (via Moleong, 2001: 3), metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati oleh peneliti.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Sajak-sajak dikumpulkan dari beberapa sumber, yaitu sumber yang telah dipublikasikan dalam bentuk cetak, seperti Bisri dalam antologi *Negeri Daging* (2002), Ismail dalam antologi *Malu (Aku) Jadi Orang Indonesia* (2000), Sylado dalam antologi *Puisi Mbeling* (2004), dan Thukul dalam antologi *Aku Ingin Jadi Peluru* (2004). Selain itu, terdapat sumber yang diakses dari laman, seperti Rendra dalam sajak "Pantun Koruptor" (2011) dan Sujiwotejo dalam sajak "Puisi Lautan Tangis" (2007). Studi pustaka juga dilakukan untuk memperoleh referensi dan data lain yang mendukung analisis dalam kajian ini.

Dalam kajian ini yang dianalisis adalah gambaran masalah korupsi, pesan kepada pembaca yang terkandung dalam masalah korupsi yang digambarkan, serta cara penyampaian pesan kepada pembaca dalam

teks puisi. Analisis tersebut dilakukan berdasarkan langkah-langkah berikut.

- (a) Membaca teks-teks puisi karya penyair Indonesia.
- (b) Mengategorisasikan teks-teks puisi yang bertema korupsi.
- (c) Menentukan sampel dengan kriteria adanya dominasi masalah korupsi dalam keseluruhan sajak yang sekaligus digunakan sebagai pesan antikorupsi dan disampaikan dengan cara yang unik atau spesifik.
- (d) Menganalisis masalah korupsi di Indonesia yang digambarkan dalam teks puisi.
- (e) Menganalisis pesan kepada pembaca yang terkandung di dalamnya.
- (f) Menganalisis cara penyampaian pesan tersebut kepada pembaca.
- (g) Menarik simpulan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil

Puisi sebagai salah satu jenis sastra merefleksikan masalah sosial dalam masyarakat, termasuk korupsi. Penyair Indonesia cukup banyak yang mengangkat masalah korupsi dalam puisinya. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa masalah keburukan para koruptor yang dikemukakan melalui gaya satire-sarkas ditujukan sebagai persuasi kepada pembaca untuk menolak korupsi dan masalah sanksi hukum yang ringan bagi koruptor Indonesia jika dibandingkan negara lain digunakan untuk membangkitkan kesadaran pembaca agar berpikir kritis. Selain itu, hasil kajian ini juga menunjukkan bahwa masalah maraknya budaya suap yang disampaikan lewat alegori bertujuan menguatkan kewaspadaan terhadap korupsi dan masalah dampak korupsi yang disampaikan dengan gaya humor yang ironis dimaksudkan sebagai sarana penyadaran untuk memerangi korupsi.

3.2 Pembahasan

3.2.1 Keburukan Para Koruptor dalam Gaya Satire-Sarkas: Persuasi kepada Pembaca untuk Menolak Korupsi

Dalam puisi Indonesia modern terdapat beberapa representasi masalah korupsi di Indonesia. Hal tersebut tampak dalam baris-baris sajak "Kami Muak dan Bosan" karya Taufik Ismail berikut ini.

Tapi,
Kini negeri ini berubah jadi negeri copet, maling,
dan rampok,
Bandit, makelar, pemeras, pencoleng, dan penipu
("Kami Muak dan Bosan", Ismail, 2000)

Dalam penggalan puisi tersebut tampak bahwa masalah sosial, yakni korupsi menjadi pokok persoalan yang diungkapkan dan dibahas. Ketidaksimpatian terhadap korupsi dalam puisi ditunjukkan dengan diksi yang kasar, yang menyiratkan ketidaksenangan terhadap "profesi-profesi" yang tidak terpuji, seperti "copet", "maling", "rampok", "bandit", "makelar", "pemeras", "pencoleng", dan "penipu". Kata-kata tersebut memiliki kesamaan, yaitu menunjuk profesi yang berkaitan dengan aktivitas mengambil hak milik pihak lain. Perbedaan tecermin melalui adanya perbedaan dalam hal situasi, kondisi, metode, waktu, dan kelas saat beraktivitas. "Copet", "maling", dan "rampok" disejajarkan dengan "koruptor" yang aktivitas pekerjaannya sama, yakni mengambil hak milik orang lain. Diksi yang kasar menunjukkan rasa tidak simpati dan ketidaksetujuan terhadap tindak korupsi. Dengan demikian, pemilihan diksi dimaksudkan untuk penyampaian pesan antikorupsi kepada pembacanya. Sajak tersebut menyampaikan pesan anti-korupsi dengan gaya satir-sarkas. Sajak mengajak pembaca agar tidak bersimpati terhadap koruptor.

Penggunaan kata-kata yang lugas dalam puisi tersebut digunakan untuk membangun suasana dan menggambarkan situasi yang

lebih konkret. Hal tersebut memudahkan pembaca untuk memahami maksud puisi karena diksi yang digunakan sangat lugas dan menunjukkan ketidakberpihakan terhadap koruptor. Persoalan korupsi tidak disampaikan dengan penggunaan diksi yang baik dan indah, tetapi disampaikan dengan ungkapan-ungkapan secara berterus terang serta membandingkannya dengan profesi lain yang dianggap buruk di mata masyarakat, seperti copet, maling, rampok, bandit, makelar, pemeras, pencoleng, dan penipu.

Dalam sajak "Kami Muak dan Bosan" juga digambarkan situasi beserta perilaku buruk di negeri yang penuh dengan koruptor. Hal tersebut tampak dalam baris berikut ini.

Negeri penyogok dan koruptor,
Negeri yang banyak omong
Penuh fitnah kotor
Begitu banyak pembohong
Tanpa malu mengaku berdemokrasi
Padahal di benak mereka mutlak dominasi uang
dan materi
Tukang dusta, jago intrik dan ingkar janji
("Kami Muak dan Bosan", Ismail, 2000)

Dalam baris-baris sajak tersebut ditunjukkan perilaku dan sifat-sifat buruk para koruptor dalam kehidupan sosialnya, yakni banyak omong, penuh fitnah kotor, pembohong, mengaku berdemokrasi, berorientasi pada uang dan materi, suka berdusta, jago intrik, dan sering ingkar janji.

Judul puisi ini cukup provokatif karena merupakan suara-suara kolektif. Hal itu ditunjukkan melalui penggunaan kata "kami" yang dilanjutkan dengan pernyataan "muak" dan "bosan" akan masalah korupsi yang terus-menerus dihadapi dan dialami serta belum adanya solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Akan tetapi, dalam puisi ini subjek "kami" bukan hanya mewakili suara-suara kelompok tertentu, melainkan mempersoalkan nasib bangsa Indonesia karena dalam baris puisi tersebut juga menyebutkan latar tempat, yakni "negeri kita".

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa puisi “Kami Muak dan Bosan” ini mengandung persuasi bagi pembacanya untuk menolak korupsi.

Dalam hal ini, subjek “kami” dan “kita” merupakan korban terdampak dari tindak korupsi. Subjek digambarkan telah merasa lelah, capai, muak, dan bosan dengan kondisi yang ada. Dalam puisi itu tampak adanya upaya penyadaran bagi pembaca bahwa aktivitas korupsi berdampak merugikan banyak pihak. Dalam hal ini, penggunaan kata “kita” berfungsi sebagai sarana sekaligus strategi pelibatan perasaan pembaca sehingga dapat mempermudah penyampaian pesan antikorupsi yang disampaikan dalam puisi.

3.2.2 Sanksi Hukum yang Meringankan Koruptor di Indonesia dalam Perbandingan: Membangkitkan Kesadaran Pembaca agar Berpikir Kritis

Selain mengemukakan perilaku koruptor yang memuakkan, sajak “Kami Muak dan Bosan” karya Taufik Ismail juga membahas sanksi hukum bagi para koruptor di Indonesia. Bahasan dengan membandingkan sanksi hukum bagi para koruptor di Indonesia dengan yang di Cina dan Arab Saudi. Hal tersebut tampak dalam potongan sajak berikut ini.

Di Republik Rakyat Cina
Koruptor
Dipotong kepala
Di kerajaan Arab saudi
Koruptor
Dipotong tangan
Di Indonesia
Koruptor
Dipotong masa tahanan
 (“Kami Muak dan Bosan”, Ismail, 2000)

Potongan baris sajak tersebut di atas menunjukkan adanya perbandingan sanksi hukum untuk kasus korupsi di tiga negara, yakni Cina, Saudi Arabia, dan Indonesia. Dalam perbandingan tersebut tampak bahwa

sanksi hukum bagi koruptor di Cina dan Saudi Arabia sangat berat, bahkan di Cina koruptor dipotong kepala atau dijatuhi hukuman mati. Di Saudi Arabia koruptor dipotong tangannya sehingga otomatis akan hidup tanpa daya setelah dijatuhi hukuman. Beratnya sanksi hukum terhadap koruptor di kedua negara tersebut menyebabkan orang tidak berani dan enggan melakukan tindak korupsi. Dengan kata lain, sanksi hukum yang berat secara psikologis akan memengaruhi seseorang untuk tidak melakukan tindak korupsi. Sebaliknya, kondisi di Indonesia sangat ironis. Koruptor hanya dijatuhi hukuman penjara beberapa tahun. Itu pun masih dipotong masa tahanan. Sanksi hukum yang kurang berat bagi koruptor di Indonesia mendorong suburnya korupsi di Indonesia. Dengan demikian, sebaiknya harus ada revisi terhadap aturan hukum yang berlaku di Indonesia dengan memperberat sanksi hukum bagi terdakwa tindak pidana korupsi.

Potongan baris sajak //Di Republik Rakyat Cina/ koruptor/ dipotong kepala/ Di kerajaan Arab Saudi/ koruptor/ dipotong tangan, mengajak pembaca untuk memperluas wawasan tentang sanksi hukum bagi para koruptor. Dengan melihat fakta di Cina maupun Saudi Arabia, pembaca diajak untuk berpikir secara lebih kritis tentang sanksi hukum bagi koruptor. Dalam hal ini, tampak adanya relasi antara sastra dan politik, khususnya di Indonesia, seperti digambarkan dalam baris sajak /Di Indonesia/koruptor-/dipotong masa tahanan. Apabila di negara lain sanksi hukum untuk koruptor sangat berat, di Indonesia justru sebaliknya. Hal tersebut disebabkan pelaku tindak korupsi di Indonesia biasanya melibatkan para pelaku politik sekaligus penguasa sehingga yang terjadi justru politisasi hukum.

3.2.3 Maraknya Budaya Suap Disampaikan Melalui Kiasan Alegori: Penguatan Kewaspadaan terhadap Korupsi

Masalah korupsi juga diangkat sebagai gagasan pokok dalam sajak “Di Negeri Amplop” karya A. Mustofa Bisri (Gus Mus). Hal itu tampak dalam puisi berikut.

Amplop-amplop menguasai penguasa
Dan mengendalikan orang-orang biasa
Amplop-amplop membeberkan dan
menyembunyikan
Mencairkan dan membekukan
Menganjal dan melicinkan
 (“Di Negeri Amplop”, Bisri, 2002)

Dalam penggalan puisi tersebut tampak bahwa “amplop” sebagai subjek yang menggerakkan peristiwa dalam puisi. “Amplop” dianggap memiliki kemampuan, daya dan kuasa yang luar biasa besar terhadap subjek-subjek lain. “Amplop” dapat mengendalikan orang-orang biasa. “Amplop” juga mampu membeberkan, menyembunyikan, mencairkan, membekukan, menganjal, dan melicinkan berbagai urusan. Artinya, “amplop” memiliki kuasa untuk mengendalikan dan mengontrol berbagai peristiwa, baik yang menyangkut penguasa maupun orang biasa. Hal tersebut merupakan fenomena yang luar biasa karena sebuah benda kecil yang disebut “amplop” itu ternyata bisa mengalahkan kekuatan iman manusia dan mengendalikan manusia dalam berbagai sektor kehidupan secara signifikan.

Puisi “Di Negeri Amplop” ini mengemukakan masalah korupsi dengan menggunakan kiasan alegoris yang personifikatif. Masalah korupsi di Indonesia dikiaskan dengan peristiwa yang terjadi di “negeri amplop” yang segala aspek kehidupannya dikendalikan oleh amplop. Budaya amplop atau budaya suap (sogok) masih sangat marak di Indonesia. Korupsi dalam sajak ini diwakili dengan penggunaan kiasan sinekdoki pars pro toto “amplop”.

Untuk memperkuat gambaran tentang pengaruh dan kuasa “amplop” yang sangat hebat di “negeri amplop” digunakan cara yang menarik. Hal tersebut diperlihatkan melalui penggalan puisi berikut ini.

Amplop-amplop di negeri amplop
Mengatur dengan teratur
Hal-hal yang tak teratur menjadi teratur
Hal-hal yang teratur menjadi tak teratur
Memutuskan putusan yang tak putus
Membatalkan putusan yang sudah putus
 (“Di Negeri Amplop”, Bisri, 2002)

Dalam potongan baris sajak tersebut, oposisi biner yang dikemukakan dengan gaya antitesis berfungsi untuk memperjelas realitas daya dan dampak “amplop” di “negeri amplop” yang digambarkan dalam sajak.

Baris sajak /Orang-orang bicara bisa bisu/ memperlihatkan bahwa setiap kalangan memiliki potensi untuk terpengaruh dan melakukan tindakan korupsi. Baris sajak tersebut memperjelas kekuatan amplop untuk melakukan perubahan secara drastis. Di negeri “amplop”, semua hal dapat terjadi. Pada baris selanjutnya, yakni /Orang mendengar bisu tuli/, memperkuat gambaran akan kehebatan daya “amplop” sehingga orang yang sebenarnya mengetahui telah terjadi tindak korupsi pun mendadak berpura-pura tidak tahu dan sama sekali tidak mau berkomentar. Hal tersebut disebabkan pihak tersebut telah diberi sogokan juga yang berupa “amplop”.

Semuanya dapat terjadi di negeri tersebut. Negeri yang dimaksud adalah negeri yang sengaja diciptakan dan “amplop” menjadi lambang terciptanya negeri tersebut. Penggambaran tersebut berguna bagi pembaca untuk melihat realitas sosial bahwa setiap lapisan masyarakat dapat terlibat dalam aktivitas korupsi. Hal itu ditunjukkan pada baris selanjutnya, yakni /Orang alim bisa napsu/ dan /Orang sakti bisa mati/ sebagai perwujudan sebab-akibat dari tindakan korupsi.

3.2.4 Dampak Korupsi Yang Merugikan Rakyat melalui Gaya Humor yang Ironis: Penyadaran bagi Pembaca untuk Memerangi Korupsi

Selain dalam puisi “Kami Muak dan Bosan” karya Taufik Ismail dan puisi “Di Negeri Amplop” karya A. Mustofa Bisri (Gus Mus), representasi korupsi dan dampaknya di Indonesia serta wacana antikorupsi bagi pembaca juga terdapat dalam puisi “Dua Daya” karya Remy Sylado. Hal tersebut tampak dalam baris-baris puisi berikut ini.

Motivator
Berbicara tentang
Memberdayakan rakyat
Koruptor
Berbicara tentang
Memperdayakan rakyat
 (“Dua Daya”, Sylado, 2004)

Dalam sajak “Dua Daya” tersebut tampak bahwa masalah korupsi disajikan dengan cara yang unik dan menarik. Puisi ini termasuk jenis satire karena mengandung sindiran atau kritikan tentang ketidakberesan kondisi sosial masyarakat atau suatu kelompok yang terlibat tindak korupsi. Sajak “Dua Daya” yang ditulis oleh Remy Sylado, salah satu pelopor gerakan puisi *mbeling*, menyampaikan kritik terhadap koruptor dengan gaya kelakar. Berdasarkan sajak tersebut, subjek “motivator” dan “koruptor” dipertentangkan. Hal tersebut ditunjukkan melalui fungsi masing-masing profesi. Persoalannya terletak pada kata “daya” yang diberi imbuhan yang berbeda, yakni “memberdayakan” dan “memperdayakan” yang kemudian menghasilkan kata dengan arti yang berbeda jauh, meskipun sebenarnya perbedaan kedua kata tersebut hanya terletak pada satu fonem saja, yakni fonem /b/ dan /p/ yang sama-sama bilabial. Kata “memberdayakan” berarti membuat berdaya (bermakna positif), sedangkan “memperdayakan” berarti membuat terpedaya (bermakna negatif). Dengan

demikian, judul sajak “Dua Daya” menunjukkan bahwa kata daya bisa memiliki dua makna yang saling berlawanan.

Sajak “Dua Daya” ini menyampaikan pesan antikorupsi dengan cara yang sederhana, singkat, padat, dan humoris sehingga pembaca lebih mudah dan ringan dalam memahami pesan yang terkandung dalam puisi. Selain itu, sajak ini juga bertujuan untuk mengingatkan pembaca agar waspada dan melawan koruptor yang sesungguhnya telah memperdaya masyarakat.

Hampir sama dengan sajak “Dua Daya” karya Remy Sylado, sajak “Tong Potong Roti” karya Wiji Thukul juga menggunakan gaya satire yang dipadukan dengan humor. Hal tersebut tampak dalam baris-baris puisi berikut ini.

Tong potong roti
Roti campur mentega
Belanda sudah pergi
kini datang gantinya

Tong potong roti
Roti campur mentega
Belanda sudah pergi
Bagi-bagi tanahnya

Tong potong roti
Roti campur mentega
Belanda sudah pergi
Siapa beli gunungnya

Tong potong roti
Roti campur mentega
Belanda sudah pergi
Kini Indonesia

Tong potong roti
Roti campur mentega
Belanda sudah pergi
Kini siapa yang punya
 (“Tong Potong Roti”, Thukul, 2004)

Sajak “Tong Potong Roti” terinspirasi dari dialek Madura yang cukup populer di kalangan masyarakat Indonesia. Sajak ini menyadarkan pembaca untuk berpikir kritis

dalam menyikapi permasalahan kepemilikan atau hak milik di negeri ini karena hal tersebut berkaitan dengan masalah korupsi.

Dalam sajak ini, kritik sosial disampaikan melalui humor atau kelakar sehingga kritik yang disampaikan tidak terkesan frontal bagi pihak yang dikritik. Pengungkapan dengan cara tersebut lebih persuasif dan tidak monoton bagi pembacanya. Sajak ini juga menggunakan bentuk pantun dengan rima akhir a-b-a-b. Sajak ini memiliki sampiran, yakni baris pertama dan kedua yang berbunyi "tong potong roti" dan "roti campur mentega" yang selalu diulang-ulang pada bait-bait berikutnya. Pengulangan sampiran dan baris pertama bagian isi dalam setiap bait sajak dimaksudkan sebagai penekanan bahwa masalah korupsi sudah sangat lama berlangsung di Indonesia, mulai sejak zaman penjajahan Belanda hingga saat ini. Perbedaan hanya pada subjek pelaku tindak korupsi. Pada masa penjajahan, koruptor ialah orang-orang Belanda dan sebagian bangsawan pribumi, sedangkan pada masa kini, koruptor ialah para penguasa di Indonesia. Meskipun pelakunya berbeda, pihak yang terdampak tetap sama, yakni rakyat Indonesia. Oleh karena itu, sudah semestinya rakyat Indonesia bangkit memerangi korupsi.

"Roti" dan "mentega" bukanlah kebudayaan asli bagi masyarakat Indonesia, melainkan kebudayaan dari Belanda – negara yang telah menjajah Indonesia selama ratusan tahun. Melalui dua objek tersebut, yakni "roti" dan "mentega", puisi ini menunjukkan unsur satir terhadap kondisi zaman yang diungkap dalam puisi. Belanda sudah tidak menjajah Indonesia lagi, tapi "roti" dan "mentega" masih menjadi persoalan pokok yang dikemukakan dalam puisi. Hal tersebut disebabkan puisi ini berusaha untuk mengungkapkan persoalan relasi antarpusat dan pinggiran seperti yang terdapat dalam wacana dominan zaman yang dimaksud.

Selain itu, gambaran makna dari "roti" dan "mentega" juga mengungkapkan bahwa tradisi korupsi di Indonesia merupakan warisan dari penjajah Belanda. Panjangnya waktu penjajahan Belanda di Indonesia menjadi asal muasal masalah sosial, yakni korupsi di negeri ini. Beberapa ahli, seperti Clive Day (1966) menyoroti peran VOC dan pemerintahan kolonial sebagai lembaga yang memperkenalkan tradisi korupsi, sebelum Indonesia mengenal sistem pemerintahan modern. Ketika itu VOC bersama dengan pemerintah kolonial mengganti sistem penggajian tradisional dengan sistem pajak atas tanah dan hasilnya terkait dengan kekuasaan – praktik korupsi yang dilakukan oleh para priyayi Jawa – untuk mendapatkan kekuasaan yang dibagi-bagikan oleh Belanda. VOC bangkrut karena praktik korupsi yang meluas di lingkungan perusahaan perdagangan tersebut. Hal itu termuat dalam tulisan Dr. J. C. Van Leur – sarjana Belanda.

Seperti halnya sajak "Tong Potong Roti" karya Wiji Thukul, kritik terhadap koruptor yang disampaikan dengan menggunakan bentuk pantun juga tampak dalam sajak karya W.S. Rendra, yakni "Pantun Koruptor". Hal tersebut dapat dilihat dalam baris-baris sajak berikut ini.

Kalau ada sumur di ladang
Jangan diintip orang yang mandi
Koruptor akalnya panjang
jaksa dan hakim diajak kompromi

Berburu ke padang datar
Mendapat gagal belang di kaki
Koruptor sakit diijinkan pesiar
Uang rakyat dibawa lari

("Pantun Koruptor", Rendra, 2011)

Puisi di atas menggunakan salah satu bentuk puisi lama, yakni pantun. Penggunaan bentuk pantun di sini disebabkan pantun merupakan media komunikasi yang efektif dan masih bertahan popularitasnya hingga sekarang. Dalam "Pantun Koruptor" ini

tampak ada sinergi antara jenis pantun nasihat dan pantun jenaka. Sajak ini memang dimaksudkan untuk memberikan nasihat atau penyadaran kepada pembaca dengan cara berkelakar. Dalam sajak "Pantun Koruptor" digunakan sampiran dan isi serta sajak akhir a-b-a-b. "Pantun Koruptor" karya Rendra itu memiliki keunikan dalam hal komposisi. Setiap bait selalu diawali dengan penggalan sampiran pantun yang cukup populer dalam masyarakat, seperti "kalau ada sumur di ladang", "berburu ke padang datar", "berakit-rakit ke hulu", "kura-kura dalam perahu", "katak hendak menjadi lembu", dan "guru kencing berdiri". Akan tetapi, baris kedua sampiran tidak diteruskan dan justru "diplestetkan" dengan kata-kata lain untuk menciptakan humor. Dengan demikian, kritik terhadap para koruptor yang disampaikan sebagai isi pada baris-baris berikutnya terkesan tidak vulgar.

Digunakannya sampiran yang sudah sangat populer di kalangan masyarakat pada setiap awal bait "Pantun Koruptor" dimaksudkan agar pembaca merasa dekat atau familiar dengan kalimat-kalimat tersebut. Dengan itu, pesan dan gagasan antikorupsi dapat diterima dengan lebih mudah, lancar, dan baik. Cara pengungkapan pesan dengan gaya berpantun dapat menghibur pembaca. Pembaca akan tertarik atas muatan yang disuarakan serta dapat menginterpretasikan kandungan pesan dalam puisi tersebut.

Masalah korupsi juga terdapat dalam sajak "Puisi Lautan Tangis" karya Sujiwo Tejo. Dalam sajak itu, dampak korupsi yang begitu luas ditunjukkan secara eksplisit melalui judul puisinya, yaitu "Puisi Lautan Tangis". Dalam hal ini, "lautan tangis" merupakan kritik yang hiperbolis karena menggambarkan begitu banyak dan luasnya dampak negatif kasus korupsi di Indonesia sehingga masyarakat mengalami penderitaan yang sangat dalam di berbagai aspek kehidupan. Penderitaan yang sangat dalam dapat menimbulkan dampak yang sangat

luas sehingga digambarkan sebagai "lautan tangis".

Bait-bait sajak "Puisi Lautan Tangis" ini menggunakan mekanisme khas orang Jawa dalam berkomunikasi, yakni *nglulu* 'memerintah, tapi sebenarnya melarang'. Hal tersebut tampak dalam baris berikut ini.

Berlayarlah di laut-laut keringat kami
 Tertawalah di laut laut keringat kami
 Berselancarlah di laut-laut keringat kami
 Berpesiarlah di laut-laut keringat kami

 Pesta poralah di gunung kesabaran kami
 Dansa dansilah di gunung kesabaran kami
 Injak injakkan kakimu di gunung kesabaran kami
 Buang botol-botol minumu di gunung kesabaran kami
 ("Puisi Lautan Tangis", Sujiwotejo, 2007)

Mekanisme yang diambil dari *nglulu* ialah mengubah protes, yang dalam hal ini protes terhadap koruptor, menjadi lelucon. Dengan demikian, relasi kedua belah pihak yang berkomunikasi tetap baik, tetapi protes tetap tersampaikan.

Protes yang menyerupai nasihat atau peringatan kepada para koruptor disampaikan dalam dua bait terakhir sajak ini. Hal tersebut dapat dilihat dalam kutipan di bawah ini.

Bersabar bersabar sampai habis sabar
 Sabar jadi riak, riak jadi ombak
 Bersabar bersabar sampai habis sabar
 Gunungpun bergetar, laut bergelora
 Bergelora gelora bergunung gunung ombak
 Gulungan gelombang keringat tangisan kami

Hati hati jangan kau terlena di laut tangis kami
 Hati hati jangan kau haha hi hi di laut keringat kami
 Awas awas awas di gunung kesabaran kami
 Mawas-mawas dirilah di gunung kesabaran kami
 ("Puisi Lautan Tangis", Sujiwotejo, 2007)

Protes dikemukakan dengan mengemukakan risiko atau bahaya apabila kesabaran rakyat habis karena kesabaran itu

tetap ada batasnya. Pada suatu ketika rakyat yang sudah terlalu lama menahan penderitaan akibat tindak korupsi yang dilakukan para penguasa pasti akan kehabisan kesabaran dan meledak amarahnya hingga melakukan balas dendam dan menyerang balik dengan tindakan yang sangat dahsyat.

Puisi tersebut terdiri atas tujuh bait. Masing-masing bait memperlihatkan situasi dan kondisi yang berbeda. Bait pertama menggambarkan kepasrahan dan bait selanjutnya berupa kebangkitan dari kepasrahan tersebut. Bait berikutnya mengalami kepasrahan dan disusul oleh bait penyemangat karena kesabaran itu tetap ada batasnya. Puisi ini mencoba menggambarkan dinamika emosi dan semangat rakyat yang turun-naik dalam menghadapi persoalan korupsi.

Puisi ini bertujuan untuk memantik emosi pembaca agar tidak hanya bersikap pasrah, *nrimo*, dan sabar ketika menghadapi masalah korupsi di negeri ini. Masyarakat harus segera bangkit memerangi korupsi. Bait yang menunjukkan “kebangkitan” dapat memunculkan keyakinan pembaca untuk segera bergerak memerangi korupsi. Hal tersebut tampak dalam bait berikut ini.

Bersabar bersabar sampai habis sabar
Sabar jadi riak, riak jadi ombak
Bersabar bersabar sampai habis sabar
Gunungpun bergetar, laut bergelora
Bergelora gelora bergunung gunung ombak
Gulungan gelombang keringat tangisan kami
(“Puisi Lautan Tangis”, Sujiwotejo, 2007)

Dalam “Puisi Lautan Tangis” tampak ada pesan bahwa rakyat harus segera bangkit melawan korupsi. Jika hanya dengan bersabar, korupsi tidak akan terselesaikan. Dengan demikian, puisi ini bermanfaat untuk membangkitkan kesadaran, rasa percaya diri, dan keberanian untuk memerangi korupsi.

4. Simpulan

Dari uraian tersebut di atas, dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut.

a. Ada beberapa masalah terkait korupsi yang digambarkan dalam puisi, yakni keburukan para koruptor, sanksi hukum yang dipolitisasi sehingga meringankan koruptor di Indonesia, maraknya budaya suap di mana-mana, dan dampak korupsi yang merugikan rakyat.

b. Pesan antikorupsi kepada pembaca disampaikan dengan berbagai cara atau strategi yang unik dan menarik sehingga memberikan efek tertentu kepada pembacanya.

c. Masalah keburukan para koruptor yang dikemukakan dengan gaya satir-sarkas berfungsi untuk mengajak pembaca menolak korupsi.

d. Sanksi hukum bagi para koruptor di Indonesia yang sangat ringan dibandingkan dengan negara lain dimaksudkan untuk membuka wawasan pembaca sehingga mampu berpikir kritis.

e. Maraknya budaya suap yang dikemukakan dengan alegori ditujukan untuk menasihati pembaca agar meningkatkan kewaspadaan sehingga terhindar dari korupsi. Dalam hal ini, alegori digunakan sebagai sarana untuk menasihati, tanpa harus menggurui.

f. Dampak korupsi yang merugikan rakyat dikemukakan dengan gaya humor yang ironis atau satire sehingga mampu membangkitkan kesadaran, rasa percaya diri, dan keberanian dalam diri pembacanya untuk segera bertindak memerangi korupsi. Penyampaian kritik dalam bentuk humor atau lelucon tersebut membuat relasi antara para pihak yang “berkomunikasi” tetap bisa berjalan dengan baik, tetapi kritik tetap dapat tersampaikan, meskipun dengan cara yang tidak vulgar.

g. Puisi dapat dijadikan sebagai sarana untuk membangkitkan inspirasi dan penyadaran sehingga bisa mengubah pola

pikir, cara pandang, dan perilaku masyarakat pembaca dalam menyikapi berbagai masalah, termasuk di dalamnya masalah korupsi.

Daftar Pustaka

- Abrams, M. H. 1981. *A Glossary of Literary Terms*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Bisri, M. 2002. *Negeri Daging*. Yogyakarta: Bentang Budaya.
- Damono, S. D. 1984. *Sosiologi Sastra: Sebuah Pengantar Ringkas*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Dubey, Ajun. 2013. "Literature and Society". *IOSR Journal of Humanities and Social Science*. Vol. 9. Issue 6. Hlm. 84–85. Diakses dari www.iosrjournals.org, 1 Mei 2019.
- Duhan, Roshni. 2015. "The Relationship between Literature and Society". *Language in India*. Vol. 15 Issue 4, p192-202. Diakses dari <https://web.a.ebscohost.com/>
- Endraswara, S. 2004. *Metodologi Penelitian Sastra: Epistemologi, Model, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama.
- Escarpit, R. 2005. *Sosiologi Sastra*. Yogyakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Ismail, T. 2000. *Malu (Aku) Jadi Orang Indonesia*. Jakarta: Yayasan Indonesia.
- Luxemburg, J. van. 1984. *Pengantar Ilmu Sastra*. Jakarta: Gramedia.
- Moleong, L. J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pradopo, R. D. 1997. *Prinsip-Prinsip Kritik Sastra*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ratna, N. K. 2008. *Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rendra. 2011. "Pantun Koruptor". Diakses dari <https://www.kompasiana.com>, 20 Maret 2018.
- Soemanto, B. 2001. *Jagat Teater*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Sujiwotejo. 2007. "Puisi Lautan Tangis". Diakses dari <https://sujiwotejo.com>, 15 Maret 2018.
- Sylado, R. 2004. *Puisi Mbeling*. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).
- Taum, Y. Y. 2015. *Sastra dan Politik: Representasi Tragedi 1965 dalam Negara Orde Baru*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Teeuw, A. 1984. *Sastra dan Ilmu Sastra: Pengantar Teori Sastra*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Thukul, W. 2004. *Aku Ingin Jadi Peluru*. Tangerang: Agromedia Pustaka.
- Weber, Hannah A. "Literature as a Social Tool: Education and Cohesion or Class Domination?". *Inquiries Journal: Social Sciences, Arts & Humanities*. 2012. Vol. 4. No. 1. Diakses dari www.inquiriesjournal.com, 1 Mei 2019.
- Wellek, R. & Austin W. 1990. *Teori Kesusastraan*. Madison: Melani Budianta (transletter). Jakarta: Pustaka Jaya.